



**BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

Dengan persetujuan .....

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN  
dan  
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.994.909.650.144,- bertambah sejumlah Rp.5.168.287.781,- sehingga menjadi Rp.1.000.077.937.925,- dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                        |                         |  |
|--|------------------------|-------------------------|--|
| 1. Pendapatan Daerah                             |                        |                         |  |
| a. Semula  | Rp. 908.671.438.981,-  |                         |  |
| b. Bertambah/berkurang                           | Rp. 78.131.318.827,-   |                         |  |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan              |                        | Rp. 986.802.757.808,-   |  |
| 2. Belanja Daerah                                |                        |                         |  |
| a. Semula  | Rp. 994.909.650.144,-  |                         |  |
| b. Bertambah/berkurang                           | Rp. 5.168.287.781,-    |                         |  |
| Jumlah Belanja setelah perubahan                 |                        | Rp. 1.000.077.937.925,- |  |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan              |                        | Rp. (13.275.180.117,-)  |  |
| 3. Pembiayaan Daerah :                           |                        |                         |  |
| a. Penerimaan                                    |                        |                         |  |
| 1) Semula  | Rp. 87.738.211.163,-   |                         |  |
| 2) Bertambah/berkurang                           | Rp. (74.463.031.046,-) |                         |  |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan              |                        | Rp. 13.275.180.117,-    |  |
| b. Pengeluaran                                   |                        |                         |  |
| 1) Semula  | Rp. 1.500.000.000,-    |                         |  |
| 2) Bertambah/berkurang                           | Rp. (1.500.000.000,-)  |                         |  |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan             |                        | Rp. 0,-                 |  |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan        |                        | Rp. 13.275.180.117,-    |  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan |                        | Rp. 0,-                 |  |

Pasal 2

- |   |                       |                       |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : |                       |                       |  |
| a. Pendapatan Asli Daerah   |                       |                       |  |
| 1) Semula   | Rp. 178.384.571.161,- |                       |  |
| 2) Bertambah/berkurang  | Rp. 6.433.199.292,-   |                       |  |
| Jumlah pendapatan asli setelah perubahan                                    |                       | Rp. 184.817.770.453,- |  |
| b. Dana Perimbangan   |                       |                       |  |
| 1) Semula   | Rp. 639.222.703.820,- |                       |  |
| 2) Bertambah/berkurang  | Rp. 62.313.837.816,-  |                       |  |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan                                   |                       | Rp. 701.536.541.636,- |  |

c. Lain-lain Pendapatan.....

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- |   |     |                  |                   |
|---|-----|------------------|-------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 91.064.164.000,- |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                                    | Rp. | 9.384.281.719,-  |                   |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah telah Perubahan | Rp. |                  | 100.448.445.719,- |
2. Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |     |                   |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                             | Rp. | 135.260.000.000,- |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                | Rp. | 11.513.823.382,-  |                   |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. |                   | 146.773.823.382,- |
- b. Retribusi Daerah
- |   |     |                 |                 |
|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1) Semula                                 | Rp. | 9.442.000.000,- |                 |
| 2) Bertambah/berkurang                    | Rp. | 550.000.000,-   |                 |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. |                 | 9.992.000.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 10.888.801.932,- |                  |
| 2) Bertambah/berkurang   | Rp. | (196.749.090,-)  |                  |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah Perubahan | Rp. |                  | 10.692.052.842,- |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |   |     |                   |                  |
|---|-----|-------------------|------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 22.793.769.229,-  |                  |
| 2) Bertambah/berkurang                                      | Rp. | (5.433.875.000,-) |                  |
| Jumlah lain-lain pdptn asli daerah yang sah telah perubahan | Rp. |                   | 17.359.894.229,- |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- |  |     |                  |                   |
|--|-----|------------------|-------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 35.923.009.500,- |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                   | Rp. | 69.219.140.124,- |                   |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. |                  | 105.142.149.624,- |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |     |                    |                   |
|--|-----|--------------------|-------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. | 449.835.609.000,-  |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                     | Rp. | (32.579.656.588,-) |                   |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. |                    | 417.255.952.412,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 153.464.085.320,- |                   |
| 2) Bertambah/berkurang                       | Rp. | 25.674.354.280,-  |                   |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. |                   | 179.138.439.600,- |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- |                                |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 1) Semula                      | Rp. | 0,- |     |
| 2) Bertambah/berkurang         | Rp. | 0,- |     |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. |     | 0,- |
- b. Dana Darurat
- |                                       |     |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1) Semula                             | Rp. | 0,- |     |
| 2) Bertambah/berkurang                | Rp. | 0,- |     |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | Rp. |     | 0,- |
- c. Dana bagi hasil Pajak
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 61.803.087.000,- |                  |
| 2) Bertambah/berkurang                         | Rp. | 9.384.281.719,-  |                  |
| Jumlah Dana Bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. |                  | 71.187.368.719,- |
- d. Dana penyesuaian .....

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	9.261.077.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		29.261.077.000,-
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,-
f. Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah setelah perubahan	Rp.		0,-

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	507.988.723.565,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(17.108.972.381,-)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		490.879.751.184,-
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	486.920.926.579,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	22.277.260.162,-	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		509.198.186.741,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	411.347.181.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(9.508.261.150,-)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		401.838.919.850,-
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	500.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(500.000.000,-)	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	6.905.960.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	1.388.760.000,-	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		8.294.720.000,-
e. Belanja Bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	4.062.400.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	2.157.500.000,-	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		6.219.900.000,-
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Bagi Hasil Keuangan setelah perubahan	Rp.		0,-

g. Belanja bantuan keuangan .....

g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	83.173.182.565,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(10.646.971.231,-)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		72.526.211.334,-
h. Belanja Tidak terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.000.000.000,-
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	79.466.644.723,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	8.027.028.010,-	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		87.493.672.733,-
b. Belanja Barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	206.639.038.213,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	(6.869.173.564,-)	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		199.769.864.649,-
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	200.815.243.643,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	21.119.405.716,-	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		221.934.649.359,-

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan :			
1 Semula	Rp.	87.738.211.163,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(74.463.031.046,-)	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		13.275.180.117,-
b. Pengeluaran :			
1 Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(1.500.000.000,-)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		0,-
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :			
1 Semula	Rp.	87.738.211.163,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(74.463.031.046,-)	
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.		13.275.180.117,-
b. Pencairan Dana Cadangan :			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Pencairan Dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,-
			d. Penerimaan.....

d. Penerimaan pinjaman daerah :			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Penerimaan Piutang setelah perubahan		Rp.	0,-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana cadangan			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1 Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	(1.500.000.000,-)	
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan		Rp.	0,-
c. Pembayaran pokok utang			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1 Semula	Rp.	0,-	
2 Bertambah/berkurang	Rp.	0,-	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Lampiran I   | Ringkasan Perubahan APBD;   |
| 2. Lampiran II  | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Pembiayaan;  |
| 4. Lampiran IV  | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  |
| 5. Lampiran V   | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
|                 | 6. Lampiran VI.....   |



- |                  |  |
|------------------|--|
| 6. Lampiran VI   | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;  |
| 7. Lampiran VII  | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran; |
| 9. Lampiran IX   | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;  |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 10 Oktober 2016

**BUPATI BINTAN**

ttd

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 10 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

ttd

**R.M. AKIB RACHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR : (6/42/2016)**

